



**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

KECAMATAN PANCA LAUTANG

**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan hidayahNYA kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dapat terlaksana secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Renja Kecamatan Panca Lautang masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bilokka, 27 Juli 2023



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU RENSTRA Perangkat Daerah | 7 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah | 7 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 16 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah | 18 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah | 19 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 30 |
| BAB III. TUJUAN DAN SASARAN | |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 32 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah | 32 |
| BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 35 |
| 4.2. Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 42 |
| BAB V. PENUTUP | 45 |
| LAMPIRAN | 46 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Pencapaian Renstra Kabupaten Sidenreng Rappang | 10 |
| Tabel TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang | 17 |
| Tabel TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang | 21 |
| Tabel TC. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 | 27 |
| Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 | 36 |
| Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang | 34 |
| Tabel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang | 42 |
| Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang..... | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun kedepan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan RENJA Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD, RENSTRA OPD, dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kecamatan Panca Lautang selaku Perangkat Daerah berkewajiban pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Panca Lautang sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Panca Lautang tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Lautang dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, setiap satuan kerja perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA Perangkat Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun kedepan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setiap Kepala Perangkat Daerah menyiapkan RENJA Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD, RENSTRA OPD, dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kecamatan Panca Lautang selaku Perangkat Daerah berkewajiban pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Panca Lautang sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.2 Landasan Hukum

Renja Kecamatan Panca Lautang tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Lautang dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
36. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerahan Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021, Nomor 71);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Perubahan Renstra Kecamatan Panca Lautang tahun 2024 – 2026 yang merupakan perencanaan satu periode (5 tahun) ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Panca Lautang;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

BASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2023 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencakup kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0 % dari target 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2022 diperkirakan telah mencapai 1,00%
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup 2 (dua) Kegiatan yaitu :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0 % dari target 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2022 diperkirakan telah mencapai 1%
 - Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target 100% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2022 diperkirakan telah mencapai 4%.
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target 100% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2022 diperkirakan telah mencapai 4%.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dari target 100% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2022 diperkirakan telah mencapai 1%.

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0% dari target 100% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2022 diperkirakan telah mencapai 1%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup :Kegiatan Perencanaan,penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2018-2023) sampai tahun 2022 diperkirakan telah mencapai 2.67%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2022 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

**TABEL TC-29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

OPD : KECAMATAN PANCA LAUTANG

| | | | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021 | | | PROGRAM REALISASI CAPAIAN TARGET NEUTRA OPD SIDENRENG RAPPANG | | | |
|---|----|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | REALISASI TARGET KINERJA USUL PROGRAM DAN KEGIATAN 90% TAHUN 2020 (Tahun 2019 + 2020) | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021 | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021 | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022 | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN 90% TAHUN 2020 (Tahun 2019 + 2020) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN KEGIATAN 90% TAHUN 2022 | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN KEGIATAN 90% TAHUN 2022 |
| | | | TARGET CAPAIIAN KINERJA PROGRAM OPD TAHUN 2020 | TARGET RENJA OPD TAHUN 2021 | TINGKAT REALISASI (%) | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2022 | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN KEGIATAN 90% TAHUN 2022 | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN KEGIATAN 90% TAHUN 2022 | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN KEGIATAN 90% TAHUN 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5 + 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 11 = (10 + 7 + 9) |
| 1 | 01 | Unsur Kewilayahan Kecamatan | | | | | | | 12 |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | - | 100 | % | 100 |
| 7 | 01 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100 | % | - | 100 | 1,00 |
| 7 | 01 | 02 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | 10 | urusan | - | Urusan |
| 7 | 01 | 02 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan | 10 | urusan | - | Urusan |
| 7 | 01 | 02 | 04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | 10 | urusan | - | Urusan |
| 7 | 01 | 02 | 04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan | 10 | urusan | - | Urusan |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|------|
| 7 01 03 | PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | 100 % | 50 % | 100 % | 50,00 % | 50 % | 100 % | 50 % | 100 % | 100 % | 1,00 |
| 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan | 100 % | - | org | 100 % | - | org | - | 100 % | 100 % | 1,00 |
| 7 01 03 2. 01 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 30 | org | - | org | - | org | - | 30 org | 30 | 1,00 |
| 7 01 03 2. 02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | 100 % | 86,67 % | 100 % | 66,67 % | 67 % | 100 % | 67 % | 100 % | 100 % | 1,00 |
| 7 01 03 2.02 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan | 3 Kel. | 6 Kel. | 3 Kel. | 3 Kel. | 3 Kel. | 100 | 3 Kel. | 12 | 4,00 | |
| 7 01 03 2.02 02 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan | 3 Kel. | 6 Kel. | 3 Kel. | 3 Kel. | 3 Kel. | 100 | 3 Kel. | 12 | 4,00 | |
| 7 01 03 2.02 03 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah kelurahan yang di evaluasi | 3 Kel. | - | Kel. | - | Kel. | - | 3 kel | 3 | 1,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 7 .01 .06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAJUAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 .01 .06 | Facilitasi, Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Facilitasi, Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 % | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 .01 .06 | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Perekayasaan Aset Desa | Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan perekayasaan aset desa yang difasilitasi | 7 desa | - | - | - | - | - | - | - | 12 desa | 12 desa |
| 7 .01 .06 | Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi | 7 desa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 .01 .06 | Facilitasi Penyelenggaran Keterlibatan Umum | Jumlah desa yang menyelenggarakan keterlibatan umum yang difasilitasi | 7 doc | - | - | - | - | - | - | - | 12 desa | 12 desa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|--|-----|-------|-----|------|-----|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|---------|------|
| X | XX | 01 | | XXX PROGRAM PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 | % | 83,33 | % | 100 | % | 83,33 | % | 83 | % | 100 | | 267 | 2,67 | |
| X | XX | 01 | 2.01 | XXX.1 Perencanaan Jaringan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja Keuangan | - | | 100 | % | 100 | % | - | % | - | % | - | - | 100 | #DIV/0! | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Yang di laporakan | 0 | | 1 | lap | - | | - | | - | - | - | 1 | #DIV/0! | |
| X | XX | 01 | 2.02 | | XXX.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Penyeleenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | | 3,86 | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 01 | XXX.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 | Bln | 28 | bln | 14 | bln | 14 | bln | 100 | 12 | bln | 54 | | 3,86 |
| X | XX | 01 | 2.02 | 01 | XXX.2.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyeleenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | % | 73 | % | 100 | % | 54,55 | % | 55 | % | 100 | % | 91 | 0,91 |
| X | XX | 01 | 2.06 | | XXX.3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bangunan yang disediakan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 34 | pkt | 4 | gdg | 12 | bln | 100 | 12 | bln | 28 | | 28 | 0,82 | |
| X | XX | 01 | 2.06 | .01 | XXX.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 29 | pkt | 2 | unit | 22 | unit | 100 | 22 | unit | 46 | | 46 | 1,59 | |
| X | XX | 01 | 2.06 | .02 | XXX.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah dan jenis perlakuan rumah tangga yang disediakan | 22 | pkt | 1 | unit | 12 | bln | 100 | 12 | bln | 25 | | 25 | 1,14 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|-----|--|--|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|
| X | XX | 01 | 2.06 | .04 | XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Pengabdian | Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengabdian kantor yang disediakan | 38 | pkt | - | bln | 12 | bln | 12 | bln | 100 | 12 | bln | 24 | bln | 24 | 0.63 |
| X | XX | 01 | 2.06 | .05 | XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi | 12 | lap | - | bln | 12 | bln | 12 | bln | 100 | 12 | bln | 24 | bln | 24 | 2.00 |
| X | XX | 01 | 2.06 | .08 | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 318 | lap | 236 | kali | 108 | kali | 108 | kali | 100 | 423 | kali | 787 | kali | 787 | 2.41 |
| X | XX | 01 | 2.06 | .09 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah | - | kali | 24 | kali | - | kali | - | kali | - | - | - | - | - | - | - |
| X | XX | 01 | 2.06 | .xx | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | - | unit | 3 | unit | - | unit | - | unit | - | - | - | - | - | - | - |
| X | XX | 01 | 2.06 | .xx | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | - | bln | 24 | bln | - | bln | - | bln | - | - | - | - | - | - | - |
| X | XX | 01 | 2.06 | .xx | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | - | bln | 24 | bln | - | bln | - | bln | - | - | - | - | - | - | - |
| X | XX | 01 | 2.06 | .xx | Penyediaan Bahan Bacaan dan Penuturan Perundang-undangan yang disediakan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | - | Eksamp. | - | Eksamp. | - | Eksamp. | - | Eksamp. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|-----|--|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------|------|
| X | XX | 01 | 2.07 | | XXX Pengeluaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | | |
| X | XX | 01 | 2.07 | 05 | XXX Pengadaan Mebel | Jumlah dan jenis mebel yang diajukan | 3 | unit | 12 | unit | 10 | unit | 83 | - | 13 | | |
| X | XX | 01 | 2.08 | | XXX Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | | |
| X | XX | 01 | 2.08 | 01 | XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dokumen bermenterai yang disediakan | 38 | lap | 200 | lbr | 150 | lbr | 100 | lbr | 500 | 13,16 | |
| X | XX | 01 | 2.08 | .02 | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 42 | lap | 24 | bln | 12 | bln | 100 | 12 | bln | 48 | 1,14 |
| X | XX | 01 | 2.08 | .04 | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Waktu pelayanan administrasi perkantoran | 56 | lap | 24 | bln | 12 | bln | 100 | 12 | bln | 48 | 0,86 |
| X | XX | 01 | 2.08 | | XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | 0,75 | |
| X | XX | 01 | 2.08 | 01 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan | 6 | unit | - | bln | 12 | bln | 100 | 12 | bln | 24 | 4,00 |
| X | XX | 01 | 2.08 | 02 | XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan | 50 | Unit | - | Unit | 31 | Unit | 100 | 95 | unit | 126 | 2,52 |
| X | XX | 01 | 2.08 | 04 | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 0 | unit | - | unit | 2 | unit | 100 | 2 | unit | 4 | - |
| X | XX | 01 | 2.08 | 11 | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah dan jenis peralatan pendukung Gedung kantor yang akan di pelihara | 3 | unit | - | unit | - | unit | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------|----------|------------|----------|--------------|
| X XXXX.02 | Program Peningkatan Sarana & Prasarana Apitur | Cukupan layanan sarana dan prasarana apitur | 43 | % | - | - | 42,86 |
| X XXXX.02.03 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dibangun | - | unit | - | - | - |
| X XXXX.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibuatkan | 2 | unit | - | - | 2,00 |
| X XXXX.02.21 | Pemeliharaan Ruang/Berkala Rumah Dinas | Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala | - | unit | - | - | - |
| X XXXX.02.22 | Pemeliharaan Ruang/Berkala Gedung Kantor | Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala | 2 | unit | - | - | 2 |
| X XXXX.02.24 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara secara berkala | 2 | unit | - | - | 2 |
| X XXXX.02.26 | Pemeliharaan Ruang/Berkala Perlengkapan gedung Kantor | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara berkala | - | unit | - | - | - |
| 9K XXXX.02.28 | Pemeliharaan Ruang/Berkala Perbaikan gedung Kantor | Jumlah dan jenis perbaikan gedung kantor yang dipelihara secara berkala | - | unit | - | - | - |
| X XXXX.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | % | - | lap | - | lap |
| X XXXX.06.02 | Penyelesaian pelaporan keuangan semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran | laporan | - | lap | - | lap |
| X XXXX.06.03 | Penyelesaian pelaporan progresis realisasi anggaran | Jumlah laporan progresis realisasi anggaran | laporan | - | lap | - | lap |
| X XXXX.06.04 | Penyelesaian pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | laporan | - | lap | - | lap |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara kelembagaan, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Lautang diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Panca Lautang tahun 2021 yaitu;

- 1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai nilai 81,97 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 81,97 dan,
- 2). Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%,
- 3). Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 72%,
- 4). Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100% dan
- 5) Predikat Nilai SAKIP mencapai 35,20 dari target 27,32 dikarenakan nilai SAKIP untuk tahun 2022 belum terbit maka nilai 35,20 tersebut diambil dari nilai tahun 2021 yang sudah dinilai oleh Tim penilai SAKIP Kabupaten Sidenreng rappang. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai lebih dari target yang diharapkan disebabkan indikator yang di survey memiliki nilai rata-rata pelayanan di atas nilai harapan.

**TABEL. TC-30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
OPD : KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | REALISASI CAPAIAN | | | | | | |
|---|--|------|-------|-------|------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Ind) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Ind) | 76 | 77,71 | 81,99 | 82 | 85 | | | | | | | | | | | 74,58 | 77,71 | 81,99 | 82,00 | | |
| 2 | Persentase layanan umum pemerintahan yang dijalankan dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 3 | Persentase kegiatan yang dikordinasikan di kecamatan | 100% | 100% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 4 | Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| 5 | Predikat Nilai SAKIP | - | - | - | - | 27,32 (C) | 32,25 (C) | 55,00 (CC) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,2 | 48,63 | | | | |

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Lautang diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada Renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Panca Lautang tahun 2022 yaitu;

- 1). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan
- 2). Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panca Lautang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang,
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorporate Sosial Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020,2021 dan 2022 berpotensi berlanjut hingga tahun 2024 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Panca Lautang.

Tahun anggaran 2024 Kantor Kecamatan Panca Lautang merencanakan 4 (empat) program, yaitu :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel TC 31.

TABEL TC-31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD : KECAMATAN PANCA LAUTANG

| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | |
|-------|--|--------------------|---|-----------------|--------------------------|--|--|---|---|----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOIAIN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOIAIN | KEBUTUHAN DANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | UNSUR KEMILAYAHAN | | | | | | | | | |
| | KECAMATAN | | | | | | | | | |
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Panca Lautang | Cakupan Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 2.200.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Panca Lautang | Cakupan Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 3.076.688.000 |
| 1,1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Panca Lautang | Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 2.200.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Panca Lautang | Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 800.000 |
| 1.1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | 8 | Lap | 1.200.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan | 8 |
| 1.1.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan | 8 | Lap | 1.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan | 8 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | KEBUTUHAN DANA | |
|-------|---|---------------------|--|----------------|----------------|--|---|---|---|----------------|-----|
| | | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOIAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2. | PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Panca Lautang | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 50.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | 100% | 50.000.000 | |
| 2.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Panca Lautang | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 50.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan | 100% | 50.000.000 | |
| 2.1.1 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 | Doc | 50.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 4 | lap |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | 78% | 524.840.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | 78% | 473.124.000 | |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan | 78% | 1.000.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan | 78% | 1.050.000 | |
| 3.1.1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Panca Lautang | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 8 | Orang | 1.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Telu Limpo | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 8 | lap |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | KEBUTUHAN DANA | | |
|-------|--|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|--------|-------------|
| | | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 3.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | 78% | 523.840.000 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Kec. Panca Lautang | Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | 74% | 472.974.000 | | |
| 3.2.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kel. Bilocka Kel. Wette Kel. Lajonga | Jumlah Lemabaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 9 | 7 | Orang | 1.000.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kel. Bilocka Kel. Wette Kel. Lajonga | Jumlah Lemabaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | |
| 3.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kel. Bilocka Kel. Wette Kel. Lajonga | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun | 11 | unit | 327.080.000 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Kel. Bilocka Kel. Wette Kel. Lajonga | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun | 36 | unit | 260.034.000 |
| 3.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kel. Bilocka Kel. Wette Kel. Lajonga | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 18 | Lap | 194.760.000 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kel. Bilocka Kel. Wette Kel. Lajonga | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 60 | pokmas | 212.040.000 |
| 3.2.4 | Evaluasi Kelurahan | Kec. Panca Lautang | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 8 | lap | 1.000.000 | Evaluasi Kelurahan | Kec. Panca Lautang | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | - | - | - |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA |
|-------|--|-------------------------|---|----------------|--------------------------|---|--|---|---|
| | | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Kec. Panca Lautang | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 875.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec. Panca Lautang | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% |
| 4 | 4.1 | Kec. Panca Lautang | Cakupan, Rekomendasi Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 875.000 | Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Panca Lautang | Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% |
| 4.1.1 | 4.1.1 | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 8 | doc | 315.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
| 4.1.2 | 4.1.2 | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 8 | doc | 350.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
| 4.1.3 | 4.1.3 | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | 8 | doc | 210.000 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | |
|-------|--|---------------------|--|----------------|----------------|--|--------------------|--|----------------|
| | | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOIAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Panca Lautang | CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 100% | 2.577.280.948 | XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Administrasi Parkantoran | 100% |
| 5.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Administrasi Parkantoran | 100% | 0.160.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Administrasi Parkantoran | 100% |
| 5.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | 106 | Doc | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Doc |
| 5.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD | 3 | Doc | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD | Doc |
| 5.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RPA-SKPD | 3 | Doc | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RPA-SKPD | Doc |
| 5.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 4 | Doc | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | Doc |

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 6 | Doc | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | - | Doc |
| 5.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Panca Lautang | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | Doc | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Panca Lautang | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | - | Doc |
| 5.2. | XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Penyelegaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 1.977.886.886 | XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Penyelegaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 1.992.830.000 |
| 5.2.1 | XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Panca Lautang | Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 490 | org | XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Panca Lautang | Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 490 | org |
| 5.2.2 | XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | Bln | 1.000.000 | XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 | - |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN SUB | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOAIAN | KEBUTUHAN DANA | | |
|-------|--|--------------------|--|-----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| C | P | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 5.3. | XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Cukupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 216.651.300 | XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | Cukupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 219.615.100 | | |
| 5.3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 47 | Pkt | 16.546.500 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 250 | Pkt | 12.919.000 |
| 5.3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 58 | Pkt | 73.374.800 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 72 | Pkt | 71.000.000 |
| 5.3.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 7 | Pkt | 15.593.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 91 | Pkt | 20.565.000 |
| 5.3.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 3.894 | Pkt | 2.500.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 0 | Pkt | 0 |
| 5.3.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan | 91.092 | Pkt | 19.927.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kec. Panca Lautang | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan | 21562 | Pkt | 25.613.600 |
| 5.3.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Panca Lautang | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 32 | Lap | 1.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kec. Panca Lautang | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | 32 | Lap | 2.415.000 |
| 5.3.7 | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 332 | Kali | 87.710.000 | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Panca Lautang | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 353 | Kali | 87.102.500 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPIAAN | KEBUTUHAN DANA | | |
|-------|--|--------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 5.4. | XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 40.000.000 | XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 5.586.000 | | |
| 5.4.1 | XXX Pengadaan Mebel | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis mebel yang diadakan | 89 | Unit | 40.000.000 | XXX Pengadaan Mebel | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis mebel yang diadakan | 10 | Unit | 5.586.000 |
| 5.4.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Panca Lautang | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 | 0 | - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec. Panca Lautang | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | - | - | - |
| 5.5 | XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 299.284.762 | XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 288.803.900 | | |
| 5.5.1 | XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Panca Lautang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | 170 | Lap | 1.100.000 | XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec. Panca Lautang | Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan | 70 | Lap | 1.400.000 |
| 5.5.2 | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Panca Lautang | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan | 12 | Lap | 47.939.000 | XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Panca Lautang | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 56 | Lap | 31.618.000 |
| 5.5.3 | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Panca Lautang | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 | Lap | 250.245.762 | XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Panca Lautang | Waktu pelayanan administrasi perkantoran | 50 | Lap | 255.785.900 |

| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | TARGET CAPOAAN | KEBUTUHAN DANA | | |
|-------|--|--------------------|---|----------------|--------------------------|---|--|---|--|----------------|------|------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPOAAN | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 5.6. | XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 43.478.200 | XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Panca Lautang | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 45.938.500 | | |
| 5.6.1 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan | 21 | Unit | 38.568.200 | XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan | 475 | Unit | 39.659.000 |
| 5.6.2 | XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan | 4 | Unit | 4.910.000 | XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Panca Lautang | Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan | 4 | Unit | 6.270.000 |
| 5.6.3 | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Panca Lautang | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 4 | Unit | - | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kec. Panca Lautang | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 0 | Unit | - |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Panca Lautang pada tahun perencanaan 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah;
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- e. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan;
- f. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- h. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing daerah;
- i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- j. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- k. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- l. Terwujudnya desa maju dan mandiri;
- m. Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang maka semua hal tersebut di atas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembangan delegasi. Dan sehubungan bahwa Kecamatan Panca Lautang bukanlah Perangkat Daerah pengembangan delegasi yang menangani teknis pelaksana usulan masyarakat maka dalam Renja Kecamatan Panca Lautang ini tidak terdapat usulan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel TC 32.

TABEL TC-32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/ VOLUME | CATATAN |
|-----|---------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIHIL

BAB III. **TUJUAN DAN SASARAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (jangka menengah) merupakan bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan yaitu, APBD awal dan APBD perubahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus selalu mengacu pada Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Visi RPJM tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” dengan Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD). Pembangunan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang

a. Tujuan

Untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kantor Kecamatan Panca Lautang menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan pemerintahan kecamatan

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan

c. Indikator Sasaran Rencana Kerja

Adapun indikator sasaran dan target kinerja tahun 2024 dari Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang yaitu:

1. Predikat Nilai SAKIP dengan target kinerja yaitu 58.00
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
3. Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 78%.
4. Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik yaitu 100%

Selanjutnya tujuan dan sasaran Kecamatan Panca Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang

| Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Formulais Indikator | Target Kinerja 2024 |
|--|---|--|---------------------|
| Unsur Kewilayahan | | | |
| Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | Predikat Nilai Sakip | $\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Babot Penilaian}} \times 100\%$ | CC (88,00) |
| Sasaran 1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum | Percentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik | $\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$ | 100% |
| 2. Meningkatnya kualitas layanan pemberdayaan masyarakat | Percentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik | $\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mendapat pemberdayaan}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100\%$ | 78 % |
| 3. Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan | Percentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik. | $\frac{\text{Jumlah urusan pembinaan & pengawasan yg dijalankan dg baik}}{\text{(Jumlah desa)}} \times 100\%$ | 100% |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Panca Lautang dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu

1. Predikat Nilai SAKIP dengan target kinerja yaitu 58.00
2. Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
3. Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 78%.
4. Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik Persentase yaitu 100%

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33 sedangkan uraian per unit organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

**TABEL TC-33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
OPD : KECAMATAN PANCA LAUTANG

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERIA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2024 | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | |
|-----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPIAAN KINERIA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | CATATAN PENTING | TARGET CAPIAAN KINERIA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Unsur Kewilayahan Kecamatan | | | | | | | | |
| 7 01 | | | | | | | | | |
| 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kec. Panca Lautang | 100 % | 800.000 | DAU | 100 % | 2.222.000 | 3.214.348.340 |
| 7 01 02 04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kec. Panca Lautang | 100 % | 800.000 | DAU | 100 % | 2.222.000 | |
| 7 01 02 04 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayaran non perizinan yang dilaksanakan | Kec. Panca Lautang | 8 lap | 400.000 | DAU | 8 | Unsan | 1.212.000 |
| 7 01 02 04 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan | Kec. Panca Lautang | 8 lap | 400.000 | DAU | 8 | lap | 1.010.000 |
| 7 01 03 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kec. Panca Lautang | 100 % | 50.000.000 | DAU | 100 % | 50.000.000 | |
| 7 01 03 2.01 | Penyelegaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengasas | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengasasan Kepala Daerah | Kec. Panca Lautang | 100 % | 50.000.000 | DAU | 100 % | 50.000.000 | |
| 7 01 03 2.01 03 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec. Panca Lautang | 4 lap | 50.000.000 | DAU | 4 | lap | 50.000.000 |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2024 | | | | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | | |
| 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 01 03 2.01 | Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | Kec. Panca Lautang | 78 % | 473.124.000 | DAU | 78 | % | 530.128.904 | |
| 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | Kec. Panca Lautang | 78 % | 1.050.000 | DAU | 78 | % | 1.050.000 | |
| 7 01 03 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | Kec. Panca Lautang | 74 % | 472.074.000 | DAU | 74 | % | 528.078.905 | |
| 7 01 03 2.01 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembar Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Kel. Bibokka Kel. Wette Kel. Lajonga | - Orang | - | DAU | 7 | lap | 1.010.000 | |
| 7 01 03 2.01 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun | Kel. Bibokka Kel. Wette Kel. Lajonga | 36 unit | 260.034.000 | DAU | 36 | unit | 330.351.305 | |
| 7 01 03 2.01 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Kel. Bibokka Kel. Wette Kel. Lajonga | 60 pokmas | 212.040.000 | DAU | 60 | pokmas | 196.707.500 | |
| 7 01 03 2.01 04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Kec. Panca Lautang | - | - | DAU | 9 | lap | 1.010.000 | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2024 | | | | CATATAN PENTING | TARGET CAIRAHAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | TARGET CAIRAHAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | |
|-----------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| | | | LOKASI | TARGET CAIRAHAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 7 01 06 2.01 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Kec. Panca Lautang | 100 % | - | - | DAU | - | - | 100 % | - | 100 % | 103.750 | |
| 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Kec. Panca Lautang | - | - | - | DAU | - | - | - | - | - | 103.750 | |
| 7 01 06 2.01 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaagunaan Aset Desa | Kec. Panca Lautang | - | - | - | DAU | - | - | - | - | - | 318.150 | |
| 7 01 06 2.01 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kec. Panca Lautang | - | - | - | DAU | - | - | - | - | - | 353.500 | |
| 7 01 06 2.01 11 | Fasilitasi Penyelegaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelegaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum | Kec. Panca Lautang | - | - | - | DAU | - | - | - | - | - | 212.100 | |
| X XX 01 | XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Administrasi Kantor | Kec. Panca Lautang | 100 % | 2.552.764.000 | DAU | - | - | - | 100 % | - | - | 2.631.113.685 | |
| X XX 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Kantor | Kec. Panca Lautang | - | - | - | DAU | - | - | - | - | - | 100 % | |
| X XX 01 2.02 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun | Kec. Panca Lautang | - | Doc | - | DAU | - | - | - | - | - | Doc | - |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2024 | | | | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
|-----------------|---|--|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPIAAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X XX 01 2.02 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | - Doc | - | DAU | - | - Doc | - |
| X XX 01 2.02 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | - Doc | - | DAU | - | - Doc | - |
| X XX 01 2.02 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | - Doc | - | DAU | - | - Doc | - |
| X XX 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | Kec. Panca Lautang | - Doc | - | DAU | - | - Doc | - |
| X XX 01 2.02 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Panca Lautang | - Doc | - | DAU | - | - Doc | - |
| X XX 01 2.02 | XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Penyelegaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | 100 % | 1.992.830.000 | DAU | 100 % | 1.997.645.352 | |
| X XX 01 2.02 01 | XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Panca Lautang | 490 org | 1.992.830.000 | DAU | 495 org | 1.996.635.352 | |
| X XX 01 2.02 03 | XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec. Panca Lautang | 0 | - | DAU | 12 doc | 1.010.000 | |

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/REGATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2024 | | | | CATATAN PENTING | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | PRAKIRAAN MAMU RENCANA TAHUN 2025 |
|------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| X XX 01 2.06 .01 | XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Panca Lautang | 100 % | 219.615.100 | DAU | 100 % | 9 | 238.533.043 | 10 |
| X XX 01 2.06 .01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Kec. Panca Lautang | 250 Pkt | 12.919.000 | DAU | 49 | Pkt | 16.711.965 | |
| X XX 01 2.06 .02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Kec. Panca Lautang | 72 Pkt | 71.000.000 | DAU | 60 | Pkt | 74.108.548 | |
| X XX 01 2.06 .03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | Kec. Panca Lautang | 91 Pkt | 20.565.000 | DAU | 8 | Pkt | 15.748.930 | |
| X XX 01 2.06 .04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Kec. Panca Lautang | - | - | DAU | 3.933 | Pkt | 2.525.000 | |
| X XX 01 2.06 .05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan | Kec. Panca Lautang | 21.562 Pkt | 25.613.600 | DAU | 92.003 | Pkt | 25.613.600 | |
| X XX 01 2.06 .08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu | Kec. Panca Lautang | 32 Lap | 2.415.000 | DAU | 32 | Lap | 2.415.000 | |
| X XX 01 2.06 .09 | XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Kec. Panca Lautang | 353 Kali | 87.102.500 | DAU | 353 | Kali | 99.412.000 | |
| X XX 01 2.07 .05 | XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kec. Panca Lautang | 100 % | 5.586.000 | DAU | 100 % | 9 | 40.400.000 | 10 |
| X XX 01 2.07 .06 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah dan jenis mebel yang diadakan | Kec. Panca Lautang | 10 Unit | 5.586.000 | DAU | 89 | Unit | 40.400.000 | |
| X XX 01 2.07 .05 | XXX Pengadaan Mebel | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Kec. Panca Lautang | - | - | DAU | - | - | - | |

| KODE | GOLONGAN DILAKUKAN PENGETAHUAN PERISTIRAHATAN DAN PENGALAMAN/PENGALAMAN/PENGALAMAN | INFORMASI DAN PROGRAM/IMPLEMENTASI (OUTCOMES)/TULIS PEGIATAN (OUTPUT) | BUDAYA DAN KINERJA | | | TARGET CAPAIAN NINERJA | KELUAR DAN MASUK INSTITUSI | DILAKUKAN DI NINERJA | CATATAN INTERVIEWS | TURUT SERTA KINERJA | PERENCANAAN DILAKUKAN DI NINERJA |
|----------------|---|--|-----------------------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | LAMA | TARIF | PERSENTASE | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| X XX 01 208 | XXX Penyelesaian Jasa Peningkatan Sumber Daya dan Pemeliharaan Daerah | Cakupan Layanan Jasa Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Panca Lautang | 100 | % | 288.863.940 | DAU | 100 | % | 305.706.300 | |
| X XX 01 208 01 | XXX Penyelesaian Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat | Kec. Panca Lautang | 36 | Lap | 1.400.000 | DAU | 171 | Lap | 1.400.000 | |
| X XX 01 208 02 | XXX Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan | Kec. Panca Lautang | 42 | Lap | 31.618.000 | DAU | 42 | Lap | 40.418.300 | |
| X XX 01 208 04 | XXX Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyelesaian jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Kec. Panca Lautang | 56 | Lap | 255.785.900 | DAU | 56 | Lap | 255.785.900 | |
| X XX 01 208 | XXX Pemeliharaan Bantuan Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Pemeliharaan Bantuan Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Panca Lautang | 100 | % | 45.929.000 | DAU | 100 | % | 46.329.000 | |
| X XX 01 208 01 | XXX Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemerintah Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan | Kec. Panca Lautang | 6 | Unit | 39.659.000 | DAU | 6 | Unit | 39.659.000 | |
| X XX 01 208 02 | XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan | Kec. Panca Lautang | 50 | Unit | 6.270.000 | DAU | 50 | Unit | 6.270.000 | |
| X XX 01 208 04 | XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | Kec. Panca Lautang | - | - | - | DAU | 2 | UNIT | 5.000.000 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | 3.076.688.000 |
| | | | | | | | | | | | 3.152.343.455 |

4.2 Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2 Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA |
|--------|--|---|
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| 1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| 1.1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan |
| 1.1.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan Umum |
| 2.1. | Penyeleggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| 2.1.1 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan |
| 3.1.1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| 3.2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan |
| 3.2.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
| 3.2.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun |
| 3.2.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| 3.2.4 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan |
| 4. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 4.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 4.1.1. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
| 4.1.2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
| 4.1.3 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteribuan Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteribuan Umum |

Selanjutnya Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kecamatan Panca Lautang disajikan pada table 3 berikut ini:

Tabel 3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome)
Kecamatan Panca Lautang

| NO. | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | Formulasi Indikator | Target Kinerja Tahun 2024 |
|-----|--|---|---|---------------------------|
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan Penyele.nggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan dengan baik | X 100% 100% |
| | | | Jumlah Urusan Pelayanan Umum | |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Penyele.nggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang dijalankan dengan baik | X 100% 100% |
| | | | Jumlah Urusan Pelayanan Umum | |
| 3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan | Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan | X 100% 78% |
| | | | Jumlah Masyarakat | |
| 4. | XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah Administrasi yang diselenggarakan | X 100% 100% |
| | | | Jumlah Layanan Administrasi | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Panca Lautang dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Panca Lautang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Panca Lautang;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Panca Lautang;
4. Kecamatan Panca Lautang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.